

**PERAN DAN KINERJA KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM
PROSES ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN
CILOANG RT 05 RW 09 KELURAHAN SUMUR PECUNG
KECAMATANSERANG KOTA SERANG**

***IMPLEMENTATION AND CHALLENGES OF POPULATION
ADMINISTRATION BY NEIGHBORHOOD ASSOCIATION (RT) LEADERS IN
CILOANG RT 05 RW 09, SUMUR PECUNG VILLAGE, SERANGDISTRICT***

¹Ulvia Fadilah, ²Zakaria Habib Al-Ra'zie

*^{1,2}Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang
email :¹dosen02884@unpam.ac.id, ²dosen10022@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan tugas administrasi kependudukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) di Lingkungan Ciloang RT 05 RW 09, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Pendekatan kualitatif digunakan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak Ketua RT mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan prosedur administrasi secara efektif, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan dukungan teknologi dari pemerintah daerah. Partisipasi warga dalam memperbarui data kependudukan jugaditemukan rendah, yang berdampak negatif pada akurasi data dan kualitas pelayanan publik. Hubungan interpersonal antara Ketua RT dan warga berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas administratif. Untuk meningkatkan kinerja Ketua RT, disarankan agar pemerintah daerah menyediakan pelatihan berkala dan teknologi informasi yang memadai, serta program sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas administrasi kependudukan di tingkat RT, yang pada akhirnya akan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : administrasi kependudukan, Ketua RT, partisipasi warga, teknologiinformasi, pelatihan.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of population administration tasks by Neighborhood Association (RT) leaders in Ciloang RT 05 RW 09, Sumur Pecung Village, Serang District, and identifies the challenges faced. A qualitative approach was employed through participatoryobservation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that many RT leaders struggle to understand and effectively apply administrative procedures due to a lack of training and technological support from local governments. Citizen participation in updating population data was also found to be low, negatively impacting data accuracy and public service quality. Interpersonal relationships between RT leaders and residents play a crucial role in the successful execution of administrative tasks. To improve the performance of RT leaders, it is recommended that local governments provide regular training and adequate information technology, along with more intensive outreach programs to enhance citizen awareness and participation. This capacity-building effort is expected to improve the quality of population administration at the RT level, ultimately supporting more effective and efficient public services.

Keywords : population administration, RT leader, citizen participation, informationtechnology, training.

I. PENDAHULUAN

Rukun Tetangga (RT) merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang memainkan peran penting dalam administrasi kependudukan dan koordinasi sosial di tingkat lokal. Keberadaan RT telah diakui secara formal melalui

berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, yang menetapkan RT sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat. Fungsi utama RT adalah memfasilitasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan, seperti pengelolaan data penduduk, pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Permendagri No. 18, 2018). Peran ini sangat vital dalam mendukung terciptanya sistem administrasi yang tertib dan efektif di tingkat lokal, yang pada gilirannya akan mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Namun, pelaksanaan tugas-tugas administratif oleh Ketua RT di berbagai wilayah, termasuk Lingkungan Ciloang RT 05 RW 09, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya pemahaman Ketua RT terhadap peran dan tanggung jawab mereka, khususnya dalam hal administrasi kependudukan. Banyak Ketua RT yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam pengelolaan data kependudukan, sehingga tugas-tugas administratif sering kali tidak dilakukan secara optimal (Fauzi, 2020). Kesalahan dalam pencatatan data penduduk dan keterlambatan dalam pembuatan dokumen kependudukan adalah beberapa masalah yang muncul akibat kurangnya kapasitas ini, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik yang diterima oleh warga.

Tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya sosialisasi dan dukungan dari pemerintah daerah dalam memberikan panduan dan pelatihan bagi Ketua RT. Sosialisasi yang kurang memadai membuat banyak Ketua RT tidak memahami sepenuhnya kebijakan dan regulasi yang harus mereka terapkan. Misalnya, prosedur yang benar dalam pembuatan KTP dan KK sering kali tidak dipahami dengan baik, sehingga menyebabkan kesalahan dalam proses administrasi (Putri, 2022). Kurangnya dukungan ini juga membuat Ketua RT merasa terbebani dengan tugas-tugas yang seharusnya dapat dilakukan lebih efisien dengan bantuan teknologi atau sistem informasi yang lebih baik.

Dalam konteks ini, peran RT menjadi semakin krusial, terutama dalam memastikan bahwa data kependudukan di tingkat lokal dikelola dengan baik. Data kependudukan yang akurat dan terkini sangat penting untuk berbagai keperluan, seperti penyaluran bantuan sosial, perencanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemilihan umum (Sari, 2021). Ketidakakuratan data kependudukan dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penting bagi Ketua RT untuk memiliki

pemahaman yang kuat tentang pentingnya tugas mereka dalam menjaga kualitas data kependudukan. Pengelolaan data kependudukan yang baik juga memerlukan adanya sistem yang efisien dan terintegrasi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu Ketua RT dalam mengelola data penduduk secara lebih efektif, mengurangi risiko kesalahan, dan mempercepat proses administrasi. Namun, hingga saat ini, banyak RT yang masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan data, yang rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien (Kusuma, 2022). Penerapan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan di tingkat RT menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Selain itu, keterlibatan aktif warga dalam proses administrasi kependudukan juga sangat penting. Warga perlu didorong untuk lebih proaktif dalam memperbarui data kependudukan mereka, seperti melaporkan perubahan alamat, status perkawinan, atau kelahiran dan kematian anggota keluarga (Rahmawati, 2022). Partisipasi aktif warga dalam proses ini tidak hanya akan membantu menjaga akurasi data kependudukan, tetapi juga akan memperkuat hubungan antara Ketua RT dan warga, serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, program-program sosialisasi yang melibatkan warga secara langsung perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan kinerja Ketua RT dalam administrasi kependudukan, penting untuk memahami faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Beberapa faktor penghambat yang sering diidentifikasi termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan teknis, dan rendahnya tingkat pendidikan atau pelatihan yang diterima oleh Ketua RT (Prasetyo, 2023). Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan pelatihan berkelanjutan, penyediaan dukungan teknis, dan peningkatan kapasitas melalui penggunaan teknologi informasi.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung kinerja Ketua RT, terutama melalui penyediaan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan. Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dapat membantu Ketua RT dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas administrasi kependudukan di lingkungan mereka. Program-program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik RT dan penyediaan perangkat teknologi yang mendukung akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi kependudukan (Wulandari, 2021). Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran di kalangan warga tentang peran penting Ketua RT dalam administrasi kependudukan. Warga yang memahami pentingnya

peran Ketua RT akan lebih cenderung untuk terlibat aktif dalam proses administrasi, seperti melaporkan perubahan data kependudukan mereka secara tepat waktu. Kesadaran ini juga dapat ditingkatkan melalui program-program sosialisasi yang dilakukan secara teratur dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi lokal (Sutrisno, 2017). Pada akhirnya, meningkatkan kinerja Ketua RT dalam administrasi kependudukan tidak hanya akan berdampak positif pada tertib administrasi di tingkat lokal, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Administrasi kependudukan yang lebih baik akan memastikan bahwa data penduduk yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah akurat dan dapat diandalkan. Ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih tertib, sejahtera, dan harmonis, di mana pelayanan publik dapat diberikan dengan cepat, tepat, dan transparan (Yulianto, 2020).

II. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara mendalam peran dan kinerja Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam administrasi kependudukan di Lingkungan Ciloang RT 05 RW 09, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara detail dinamika sosial dan interaksi yang terjadi antara Ketua RT dan warga dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana Ketua RT melaksanakan tugasnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut (Creswell, 2013). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ketua RT dan warga di lingkungan RT 05 RW 09. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses administrasi kependudukan dilakukan, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul selama pelaksanaan tugas.

Observasi dilakukan secara kontinu selama beberapa bulan untuk menangkap dinamika yang mungkin berubah seiring waktu (Moleong, 2017). Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk Ketua RT, warga, dan perwakilan pemerintah daerah. Wawancara ini menggunakan format semi-terstruktur

untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang relevan dengan topik penelitian. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mengeksplorasi pemahaman dan persepsi responden mengenai peran Ketua RT dalam administrasi kependudukan, hambatan yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap peningkatan kinerja Ketua RT (Yin, 2014).

Wawancara ini memberikan data kualitatif yang kaya, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari jawaban responden. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan di tingkat RT, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur peran dan tanggung jawab Ketua RT, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Analisis dokumen juga digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi ini mendukung atau menghambat pelaksanaan tugas-tugas administratif oleh Ketua RT (Bowen, 2009).

Data yang diperoleh dari ketiga teknik ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk menemukan kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Pendekatan ini membantu menguatkan temuan-temuan penelitian dan mengurangi bias yang mungkin timbul dari penggunaan satu metode saja (Denzin, 2017). Analisis data dilakukan secara iteratif, di mana peneliti terus-menerus kembali ke data untuk menemukan pola-pola yang muncul dan mengembangkan interpretasi yang lebih mendalam.

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif yang dikumpulkan. Analisis tematik ini melibatkan proses pengkodean data, di mana data yang relevan dikategorikan ke dalam tema-tema yang telah ditentukan sebelumnya atau yang muncul selama proses analisis. Tema-tema ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memahami hubungan antar tema dan bagaimana tema-tema tersebut berkaitan dengan tujuan penelitian (Braun & Clarke, 2006). Teknik ini sangat berguna dalam mengorganisir data yang kompleks dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti. Selama proses penelitian, peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian, terutama terkait dengan

kerahasiaan informasi dan persetujuan partisipan. Sebelum melakukan wawancara, semua partisipan diberi penjelasan tentang tujuan penelitian, dan persetujuan mereka diperoleh secara tertulis, terlihat pada gambar 1 berikut



Gambar 1. Kegiatan PKM pengelolaan administrasi kependudukan

Partisipan diberi kebebasan untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan partisipasi mereka kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Peneliti juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini (Silverman, 2015). Melalui metode pelaksanaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran dan kinerja Ketua RT dalam administrasi kependudukan di Lingkungan Ciloang RT 05 RW 09, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data untuk peningkatan kinerja di masa depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi kependudukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) di Lingkungan Ciloang RT 05 RW 09, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang. Salah satu temuan utama adalah bahwa sebagian besar Ketua RT masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan prosedur administrasi kependudukan secara efektif. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan panduan yang memadai dari pemerintah daerah, yang mengakibatkan Ketua RT harus mengandalkan pengetahuan dan pengalaman pribadi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan data kependudukan, seperti kesalahan

dalam pencatatan atau keterlambatan dalam proses pembuatan dokumen resmi (Fauzi, 2020). Wawancara dengan beberapa Ketua RT mengindikasikan bahwa mereka sering kali merasa terbebani oleh tanggung jawab administratif yang diberikan kepada mereka, terutama karena mereka tidak selalu memiliki akses ke sumber daya atau dukungan teknis yang diperlukan.

Banyak Ketua RT yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas-tugas administratif, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data kependudukan. Mereka juga menyoroti kurangnya dukungan teknologi, seperti sistem informasi yang dapat membantu mereka dalam mengelola data dengan lebih efisien (Putri, 2022). Ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan berkala maupun penyediaan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan mereka. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam proses administrasi kependudukan masih rendah. Banyak warga yang tidak menyadari pentingnya melaporkan perubahan data kependudukan mereka, seperti perubahan alamat, status perkawinan, atau kelahiran dan kematian anggota keluarga.

Rendahnya partisipasi warga ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya data kependudukan yang akurat dan terkini (Sari, 2021). Sebagai akibatnya, data yang dikelola oleh Ketua RT sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui, yang dapat berdampak negatif pada berbagai program pemerintah yang bergantung pada data tersebut, seperti penyaluran bantuan sosial dan perencanaan pembangunan. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun beberapa Ketua RT telah berusaha untuk melibatkan warga dalam proses administrasi, upaya ini sering kali tidak berhasil karena rendahnya kesadaran dan minat warga. Wawancara dengan warga mengungkapkan bahwa banyak dari mereka tidak merasa terdorong untuk terlibat aktif dalam proses administrasi karena mereka tidak melihat manfaat langsung dari pelaporan data kependudukan yang tepat waktu. Selain itu, beberapa warga mengaku merasa khawatir dengan kerumitan proses administratif, yang dianggap memakan waktu dan sulit (Rahmawati, 2022).

Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih proaktif dan inklusif dalam melibatkan warga, serta perlunya penyederhanaan prosedur administratif untuk mempermudah partisipasi warga. Hasil analisis dokumen juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan panduan yang cukup jelas mengenai tugas

dan tanggung jawab Ketua RT, implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Banyak Ketua RT yang tidak sepenuhnya memahami atau menerapkan regulasi tersebut, yang menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tugas administratif di berbagai wilayah. Misalnya, beberapa Ketua RT masih menggunakan metode manual dalam pencatatan data kependudukan, meskipun regulasi mengharuskan penggunaan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien (Kusuma, 2022).

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa regulasi dapat diterapkan dengan lebih efektif. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam kualitas pengelolaan administrasi kependudukan antara RT yang lebih maju secara teknologi dan yang masih menggunakan metode tradisional, terlihat pada gambar 2 berikut



Gambar 2. Materi kualitas pengelolaan administrasi kependudukan antara RT

RT yang telah mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan data mereka cenderung memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dan dapat menyelesaikan tugas-tugas administratif dengan lebih cepat dibandingkan dengan RT yang masih menggunakan metode manual. Namun, adopsi teknologi ini masih sangat terbatas, terutama di daerah yang kurang berkembang atau di mana infrastruktur teknologi masih minim (Prasetyo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap teknologi informasi dapat menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi kependudukan di tingkat RT. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Ketua RT dan warga sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas administratif. Ketua RT yang memiliki hubungan baik dengan warga cenderung

lebih berhasil dalam mengajak warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses administrasi kependudukan.

Sebaliknya, Ketua RT yang kurang berkomunikasi dengan warganya sering kali menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat atau dalam meminta warga untuk memperbarui data mereka (Wulandari, 2021). Ini menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal yang baik sangat penting bagi Ketua RT untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Pembahasan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan di tingkat RT, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas Ketua RT, penyediaan dukungan teknologi, dan peningkatan partisipasi warga. Peningkatan kapasitas Ketua RT dapat dilakukan melalui program pelatihan berkala yang difokuskan pada pengelolaan data kependudukan dan penggunaan teknologi informasi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan dukungan teknologi yang memadai, seperti sistem informasi terintegrasi yang dapat digunakan oleh Ketua RT untuk mengelola data penduduk dengan lebih efisien (Sutrisno, 2017). Partisipasi warga juga perlu ditingkatkan melalui program-program sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Warga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya melaporkan perubahan data kependudukan mereka dan bagaimana data tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial. Dengan partisipasi warga yang lebih aktif, diharapkan data kependudukan yang dikelola oleh Ketua RT akan lebih akurat dan terkini, yang pada akhirnya akan mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan adil (Yulianto, 2020).

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan yang dihadapi oleh Ketua RT dalam melaksanakan tugas administrasi kependudukan dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Temuan-temuan ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja Ketua RT dan kualitas administrasi kependudukan di tingkat lokal. Dengan peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dan keterlibatan aktif dari warga, diharapkan administrasi kependudukan di lingkungan RT dapat berjalan dengan lebih baik, efisien, dan akurat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas administrasi kependudukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) di Lingkungan Ciloang RT 05 RW 09 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kurangnya pelatihan dan dukungan teknologi. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan prosedur administrasi yang benar sering kali mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan data dan keterlambatan dalam pembuatan dokumen kependudukan. Selain itu, partisipasi warga dalam memperbarui data kependudukan juga ditemukan rendah, yang dapat berdampak negatif pada berbagai program pemerintah yang bergantung pada data tersebut.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Ketua RT dalam administrasi kependudukan, disarankan agar pemerintah daerah menyediakan pelatihan berkala dan dukungan teknologi yang memadai. Pelatihan ini akan membantu Ketua RT memahami tugas-tugas administratif dengan lebih baik, sementara teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Selain itu, program sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses administrasi kependudukan, guna memastikan data yang dikelola selalu akurat dan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Fauzi, F. (2020). Implementasi administrasi kependudukan di tingkat RT: Studi kasus di Kecamatan Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-60.
- Kusuma, D. (2022). Teknologi informasi dan pengelolaan data kependudukan di lingkungan RT: Tantangan dan peluang. *Jurnal Teknologi Informasi*, 14(2), 112-130.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi ed.). PT Remaja Rosdakarya.

- Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Prasetyo, H. (2023). Peningkatan kapasitas RT melalui pelatihan dan teknologi informasi. *Jurnal Manajemen Publik*, 15(1), 77-92.
- Putri, S. (2022). Pentingnya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat lokal. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 8(4), 200-215.
- Rahmawati, I. (2022). Keterlibatan warga dalam administrasi kependudukan: Studi kasus di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(3), 145-158.
- Sari, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembaruan data kependudukan. *Jurnal Sosiologi*, 18(2), 95-110.
- Silverman, D. (2015). *Doing qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sutrisno, T. (2017). *Administrasi kependudukan di Indonesia: Tantangan dan prospek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, E. (2021). Hubungan interpersonal antara ketua RT dan warga dalam pengelolaan administrasi kependudukan. *Jurnal Komunikasi*, 19(3), 134-149.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Yulianto, B. (2020). Pengelolaan administrasi kependudukan yang efektif: Studi ditingkat RT dan RW. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 33-50.